

LAPORAN

PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM



BPMP PROVINSI DKI JAKARTA
2022

KATA PENGANTAR

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur BPMP DKI Jakarta yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Untuk mewujudkan semua itu BPMP DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah strategis memelihara pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPMP DKI Jakarta. BPMP DKI Jakarta senantiasa berupaya memperkuat layanan kepada masyarakat pendidikan melalui inovasi layanan peningkatan mutu pendidikan yang efektif dan efisien, mudah dan cepat diakses, serta mendekatkan pada kebutuhan masyarakat pendidikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan BPMP DKI Jakarta, maka disusunlah laporan ini. Laporan ini yang memuat pokok-pokok kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut serta memelihara dan memperkuat Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan BPMP DKI Jakarta dan selanjutnya kami berharap Pembangunan ZI-WBK/WBBM lingkungan BPMP DKI Jakarta dapat terus lebih baik dan cita-cita terwujudnya birokrasi bersih dan melayani dapat terlaksana.

Jakarta, Desember 2022
Kepala,

Moch. Salim Somad, S. Kom., M.Pd.
NIP.197410062003121001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Hasil yang Dicapai
- E. Ruang Lingkup Pembangunan ZI

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN ZI

- A. Tim WBK/WBBM
- B. Instrumen yang Digunakan
- C. Tahapan Kegiatan
- D. Metode
- E. Unit Kerja yang menjadi Responden

BAB III HASIL EVALUASI ATAS CAPAIAN PELAKSANAAN 6 AREA PERUBAHAN

- A. Komponen Pengungkit
 - 1 Manajemen Perubahan
 - 2 Penataan Tatalaksana
 - 3 Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - 5 Penguatan Pengawasan
 - 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- B. Komponen Hasil Pembangunan ZI

BAB IV 5 LANGKAH MEMBANGUN ZI YANG DILAKSANAKAN

- A. Komitmen
- B. Kemudahan Pelayanan
- C. Program yang Menyentuh Masyarakat
- D. Monitoring dan Evaluasi
- E. Manajemen Media

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur BPMP DKI Jakarta yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Untuk menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPMP DKI Jakarta.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPMP DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang meliputi enam area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

B. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi.
2. Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2025.
3. Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
5. Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM LPMP DKI Jakarta Tahun 2022.
6. Rencana Pembangunan ZI WBK/WBBM LPMP DKI Jakarta Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Reformasi Birokrasi di BPMP DKI Jakarta adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dilakukan perubahan dalam beberapa aspek, diantaranya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas, profesionalisme, etos kerja dan kinerja birokrasi yang tinggi. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses birokrasi yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik terhadap masyarakat.

D. Hasil yang Dicapai

1. Meningkatnya komitmen seluruh PNS dan PPNPN BPMP DKI Jakarta melalui Penguatan Peran UPT dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar.
2. Terjadinya internalisasi budaya kerja pada BPMP DKI Jakarta yang ditandai dengan keaktifan seluruh pegawai mengikuti apel senin pagi dan rapat internal tim kerja dan fungsi, peningkatan layanan internal dan eksternal, dan peningkatan transparansi penganggaran dan keuangan.
3. Makin kuatnya kolaborasi dalam membangun zona integritas karena sosialisasi yang intensif, menyeluruh dan pendekatan personal.
4. Makin aktifnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui SINDE, aplikasi BDR Kemdikbudristek, dan e-SKP, serta aplikasi TIK lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai IKK.
5. Penggunaan aplikasi SI PITUNG untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaan, merekam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kinerja dan pemantauannya.
6. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan melalui pemantauan triwulanan, evaluasi kinerja pegawai per bulan, dan evaluasi pelaksanaan kerja/kegiatan bulanan.

7. Meningkatnya disiplin SDM aparatur melalui ketepatan waktu pelaksanaan pengisian log harian di e-SKP dan melaksanakan e-office dengan membuka SINDE setiap hari.
8. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur melalui penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan unit kerja dengan dilakukannya evaluasi efektivitas.
9. Meningkatnya kinerja di BPMP DKI Jakarta melalui pemantauan capaian kinerja unit per triwulan dan audit kinerja per semester.
10. Meningkatnya akuntabilitas BPMP DKI Jakarta melalui pemantauan pelaksanaan tuisi seluruh seksi dan urusan, kesesuaian dengan aturan yang berlaku serta cascading antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil.
11. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kegiatan dengan menyiapkan laporan kegiatan tepat waktu sesuai POS.
12. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di BPMP DKI Jakarta dengan melakukan penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan secara campuran (daring dan luring).
13. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di BPMP DKI Jakarta melalui pemantauan dan pengawasan melekat dari pimpinan dan tim SPI.
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan terpercaya) di BPMP DKI Jakarta yang ditandai kecepatan layanan di atas 95%.
15. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik yang ditandai nilai kepuasan layanan di atas 95%.
16. Meningkatnya layanan tata kelola satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan menggunakan aplikasi SI JAMPANG MUDIK (Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan).

E. Ruang Lingkup Pembangunan ZI-WBK/WBBM

1. Manajemen perubahan

- Penyusunan tim kerja
- Penyusunan dokumen pembangunan ZI WBK/WBBM
- Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI WBK/WBBM
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja lembaga (pimpinan sebagai role model, pemberdayaan agen perubahan, melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI WBK/WBBM)

2. Penguatan tata laksana
 - Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan utama dan pendukung
 - Evaluasi dan reviu Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan utama dan pendukung
 - Optimalisasi *e-office* (SINDE)
 - Pengelolaan keterbukaan informasi publik
3. Penataan sistem manajemen SDM
 - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - Pola mutasi internal
 - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - Penetapan kinerja individu dan pemantauannya
 - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
 - Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
4. Penguatan akuntabilitas kinerja
 - Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja dan perencanaan
 - Pengelolaan akuntabilitas kinerja
5. Penguatan Pengawasan
 - Pengendalian gratifikasi
 - Penerapan sistem pengawasan internal (SPI)
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat
 - *Whistle blowing system*
 - Penanganan benturan kepentingan
6. Penguatan pelayanan publik
 - Penyusunan prosedur operasional standar (POS) standar pelayanan
 - Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* SDM
 - Pemantauan dan evaluasi penerapan budaya pelayanan prima
 - Melakukan survei kepuasan pelanggan (masyarakat) terhadap pelayanan

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN ZI-WBK/WBBM

A. Tim Kerja

Tim kerja adalah individu/kelompok yang terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI WBK/WBBM) mulai dari penancangan, perancangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Dalam pembangunan ZI WBK/WBBM, tim kerja ini berperan sebagai motor penggerak pembangunan ZI WBK/WBBM. Tim kerja bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya dan senantiasa saling berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberikan tugas.

Adapun kriteria individu sebagai Tim Kerja di BPMP DKI Jakarta adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
- e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
- f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tim kerja BPMP DKI Jakarta ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Seluruh pimpinan/pejabat struktural (Kepala dan Kasubag Umum) serta ketua pokja di lingkungan BPMP DKI Jakarta menjadi Tim Kerja sebagai Pengarah.
- b. Pegawai yang dinilai layak dan memenuhi seluruh kriteria Tim Kerja dipilih berdasarkan kompetensi diusulkan menjadi tim kerja.
- c. Seluruh pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Kerja, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPMP/BPMP DKI Jakarta yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Tim kerja disahkan dengan surat keputusan Kepala LPMP/BPMP DKI Jakarta.

B. Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan untuk memulai, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta adalah Lembar Kerja Evaluasi

yang diberikan kepada satker pada saat sosialisasi Reformasi Birokrasi Indonesia di lingkungan Kemdikbudristek. Selanjutnya instrumen yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta adalah instrumen pemantauan praktik reformasi birokrasi dan instrumen survei lingkungan lembaga. Selanjutnya instrumen pemantauan yang digunakan adalah instrumen pemantauan keterlaksanaan program kerja dari setiap komite integritas.

C. Tahapan Kegiatan

1. Menyusun pedoman dan rencana pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta

Dokumen pedoman dan rencana pembangunan Zona Integritas adalah program, kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang target, waktu dan hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat.

2. Sosialisasi dan penanaman Zona Integritas

Pembangunan ZI- WBK/WBBM disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan menandatangani komitmen bersama. Selanjutnya disosialisasikan melalui laman dan media sosial resmi BPMP DKI Jakarta.

3. Internalisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan zona integritas

perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatukan kerjanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik. Kegiatan internalisasi dilakukan secara berjenjang.

4. Pemantauan

Melakukan pemantauan setiap target perubahan 6 zona integritas dan menindaklanjuti masukan untuk perbaikan beserta data dukungannya. Bukti fisik dari setiap zona integritas diadministrasikan secara baik dengan diberi kode.

5. Pelaporan

Setiap aktivitas di 6 zona integritas disusun laporan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan kekhasannya. Untuk laporan pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta disusun oleh komite zona integritas manajemen perubahan.

6. Metode

Pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta dilakukan secara kolaboratif. Pelibatan setiap unsur yang ada di BPMP DKI Jakarta dan sinergi antar fungsi terlihat

pada pembentukan tim kerja. Dalam setiap aktivitas membangun ZI –WBK/WBBM dilakukan secara bersama dan saling membantu antar tim, juga pelibatan seluruh pegawai di lembaga menjadi prioritas utama dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta.

7. Unit Kerja yang menjadi Responden

BPMP DKI Jakarta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau dan memastikan keterlaksanaan tugas dan fungsi serta pembangunan ZI –WBK/WBBM BPMP DKI Jakarta, dijamin informasi secara internal dari pegawai BPMP dan eksternal dari para pemangku kepentingan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru. Mereka inilah yang menjadi responden dari survei kepuasan pelanggan BPMP DKI Jakarta.

BAB III

HASIL EVALUASI ATAS CAPAIAN PELAKSANAAN 6 AREA PERUBAHAN

A. Komponen Pengungkit

1) Manajemen Perubahan

1. Sebagai dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendikbud, seluruh jajaran Pimpinan dan pegawai BPMP DKI Jakarta telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM di lingkungan BPMP DKI Jakarta melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal peningkatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Dengan komitmen tersebut, Kepala BPMP selaku role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM telah membentuk tim kerja WBK/WBBM, menetapkan agen perubahan, serta membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan BPMP DKI Jakarta dengan melibatkan seluruh pegawai baik PNS maupun PPNPN.
3. Tim kerja WBK/WBBM telah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM, mensosialisasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil-hasilnya.
4. Target utama dalam manajemen perubahan adalah implementasi tata nilai budaya kerja instansi pemerintah “BerAKHLAK” sehingga terjadi perubahan pola pikir pegawai menjadi lebih jujur, peduli, mandiri, bertanggungjawab, suka bekerja keras, sederhana, berani dan adil dalam melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat. Program BPMP DKI Jakarta menjadi lebih dekat ke masyarakat dan masyarakat merasakan kehadiran BPMP DKI Jakarta tersebut, yang diantaranya adalah perbaikan fasilitas menjadi lebih baik dan semangat keramahatan untuk kepuasan publik, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

2) Penataan Tatalaksana

1. Manajemen perubahan telah mendorong komite integritas melakukan penataan tatalaksana BPMP DKI Jakarta melalui reviu POS agar senantiasa mengacu peta proses bisnis beserta inovasinya sehingga penerapannya lebih efektif dan mudah, mengevaluasi dan menindaklanjuti usulan perbaikan POS.
2. Dalam penataan tatalaksana ini juga BPMP DKI Jakarta telah menggunakan teknologi informasi dalam hal pengukuran kinerja (*e-SKP*), operasionalisasi

manajemen SDM melalui aplikasi SI PITUNG, layanan perencanaan, layanan informasi, konsultasi, pengawasan, literasi pendidikan beserta inovasinya yaitu layanan elektronik *online* baik kepada pegawai internalnya sendiri, pegawai Kemendikbud, maupun kepada masyarakat melalui alamat situs: <https://lpmpdki.kemdlkbud.go.id/>

3. Layanan situs tersebut merupakan kebijakan Pimpinan BPMP DKI Jakarta dalam memberikan layanan informasi, komunikasi, literasi, monitoring dan evaluasi serta konsultasi kepada para pegawai internal BPMP DKI Jakarta juga masyarakat luas.
 4. Tim kerja juga melakukan penyusunan laporan bulanan atas monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi tersebut.
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Komitmen manajemen perubahan pada penataan sistem manajemen SDM dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pelaksanaan mutasi internal, penetapan kinerja individu, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian secara optimal sehingga hasilnya dapat dilihat, diuji dan dirasakan oleh seluruh pegawai.
 2. Pada perencanaan kebutuhan, BPMP DKI Jakarta telah memiliki dokumen analisis kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, sehingga penempatan pegawai hasil rekrutmen diupayakan semaksimal mungkin mengacu kepada kebutuhan pegawai per jabatan.
 3. Mutasi pegawai antar jabatan dilaksanakan sebagai wujud dari pengembangan karier dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan lembaga.
 4. BPMP DKI Jakarta telah melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan telah memiliki rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan pegawai, dan juga pemetaan kompetensi pegawai untuk mengetahui persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, membuka kesempatan/hak seluruh pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
 5. Manajemen BPMP DKI Jakarta telah menerapkan kinerja individu, dimana ukuran kinerjanya telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan dan hasil penilaian kinerja individu menjadi dasar pemberian *reward*.
 6. Manajemen BPMP DKI Jakarta telah mengimplementasikan aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku yang ditetapkan dan juga membuat inovasi penegakannya sesuai dengan karakteristik pokja.

7. Data informasi kepegawaian pokja telah dimutakhirkan secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai.
8. Sebagai aktivitas pengendalian internal, manajemen BPMP DKI Jakarta juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penataan sistem manajemen SDM yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kriteria.

4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Sebagai komitmen penguatan akuntabilitas, Pimpinan BPMP DKI Jakarta terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan, penyusunan Penetapan Kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui koordinasi rapat kerja.
2. Manajemen selalu berupaya maksimal dalam menyusun dokumen perencanaan berorientasi hasil, IKU dan laporan kinerja agar penyampaiannya selalu tepat waktu.
3. IKU dioperasional ke dalam IKI (indikator kinerja inisiatif) sebagai pengembangan penguatan kinerja untuk memudahkan dalam penyusunan SKP dan pengukuran capaian kinerja.S
4. Manajemen selalu berupaya meningkatkan kompetensi kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, agar pengelolaan akuntabilitas kinerja berkualitas dan pelaporannya memberikan informasi tentang kinerja.

5) Penguatan Pengawasan

1. Sebagai komitmen terhadap penguatan pengawasan, BPMP DKI Jakarta telah melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dengan berbagai media, serta menerapkan implementasi pengendaliannya seperti peloporan LHKPN seluruh pejabat struktural, pejabat pengadaan, dan pejabat perbendaharaan serta LKHASN bagi PNS yang tidak wajib mengisi LHKASN.
2. Manajemen telah membangun sistem pengendalian intern (SPI) secara cukup memadai yang meliputi 5 unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring dan evaluasi. Implementasi dari pelaksanaan SPI tersebut membantu tersusunnya peta risiko dan peta benturan kepentingan yang ada di BPMP DKI Jakarta.
3. Sebagai media informasi dan komunikasi, BPMP DKI Jakarta telah mengoptimalkan Unit Layanan Terpadu (ULT), menyediakan link/penghubung ke

laman pengaduan masyarakat, dan *Whistle Blowing System* (WBS) Itjen Kemdikbudristek. Tim berkoordinasi dengan Itjen untuk menginternalisasi, memantau dan menindaklanjuti pengaduan yang ada serta mengevaluasi layanannya.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu prioritas utama yang dilakukan oleh BPMP DKI Jakarta. Sebagai pengendaliannya manajemen telah menetapkan dan memperbaharui maklumat standar pelayanan, penyusunan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
2. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik, manajemen BPMP DKI Jakarta telah membangun budaya layanan prima, melaksanakan inovasi dalam penyajian informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media dan terintegrasi, berupaya membangun sistem pemberian penghargaan dan peringatan bagi pelaksana layanan.
3. Manajemen telah membangun sistem pemantauan kinerja layanan melalui survei elektronik kepuasan layanan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka, yang hasilnya menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan layanan oleh tim kerja dan manajemen BPMP DKI Jakarta.

B. Komponan Hasil Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Tim kerja dengan semangat manajemen perubahan telah membangun suatu sistem pemantauan dan evaluasi online bagi para responden pengguna layanan BPMP DKI Jakarta terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.

Nilai pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN diperoleh melalui nilai survei kuesioner persepsi korupsi (survei eksternal) *online* kepada responden pengguna layanan BPMP DKI Jakarta dan nilai persentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti BPMP DKI Jakarta.

Nilai kualitas pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kuesioner persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) BPMP DKI Jakarta.

BAB IV

LIMA LANGKAH MEMBANGUN ZI YANG DILAKSANAKAN

A. Komitmen

Pembangunan ZI – WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta diperkuat dengan komitmen bersama antara jajaran pimpinan dan seluruh pegawai BPMP DKI Jakarta untuk melangkah bersama dalam melayani stakeholder dan masyarakat umum secara cepat, sigap dan tepat melalui upaya upaya:

- Sosialisasi internal dan eksternal melalui media konkrit seperti papan komitmen, banner, dan pin.
- Penetapan agen perubahan untuk menjadi *role model* dan penggerak perubahan di lingkungan kerjanya masing masing.
- Pembentukan sarana komunikasi, diskusi dan sinergi antar pimpinan dan seluruh staf, seperti: apel pagi, tanjidor (tanya jawab, diskusi dan koordinasi), forum diskusi dan koordinasi, *morning tea* serta jumat bergelora.
- Berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi sebagai UPT peraih nilai A skor SAKIP terbaik di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdasmen 3 tahun berturut-turut: 2020 s.d 2022.

B. Kemudahan Pelayanan

Berbagai hal dilakukan BPMP DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi stakeholder dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi dan layanan dengan melakukan upaya:

- Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.
- Melakukan perbaikan dan melengkapi sarpras.
- Penyediaan informasi terkait layanan melalui saluran informasi *online* dan *offline* dengan membentuk ULT.
- Pembinaan SDM layanan sesuai standar pelayanan.
- Membuat POS layanan yang penyusunannya melibatkan stakeholder.
- Optimalisasi layanan/informasi/pengaduan melalui website resmi lembaga : <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/>

C. Program yang Menyentuh Masyarakat

BPMP memberikan layanan program/fasilitasi yang langsung menyentuh masyarakat berupa:

- a. Mengembangkan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SI JAMPANG MUDIK) yang berhasil menebar virus implementasi sistem penjaminan mutu untuk perbaikan tata kelola satuan pendidikan;
- b. Menciptakan inovasi perluasan capaian sasaran fasilitasi antara lain melalui kegiatan:
 - Belajar Bersama dalam Jaringan (Berbaring) sebagai upaya memberikan dukungan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengimplementasikan kebijakan terbaru Kemdikbudristek. Tema yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 - Belajar Hebat Penuh Tantangan bersama Widyaprada (Bhetawi) sebagai upaya memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen.

Selanjutnya program BPMP DKI Jakarta dengan tuisi penjaminan mutu yang menyentuh masyarakat pendidikan sebagai stakeholdernya.

1. Implementasi Kurikulum Merdeka
2. Program Sekolah Penggerak
3. Perencanaan Berbasis Data
4. Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Supervisi Mutu Pendidikan
6. Kemitraan

D. Monitoring dan Evaluasi

BPMP DKI Jakarta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau dan memastikan keterlaksanaan tugas dan fungsi serta pembangunan ZI – WBK/WBBM dengan cara:

- Aktif membuat terobosan dalam cara peningkatan pengelolaan kinerja, dengan bimbingan Unit Utama di Kemdikbudristek;
- Melakukan evaluasi ketercapaian program secara berkala;
- Mengukur efektifitas supervisi menggunakan aplikasi yang dikembangkan;
- Berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil monev guna perbaikan dan peningkatan mutu kinerja.

Aktivitas monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain :

- Rapat triwulanan untuk memantau capaian kinerja lembaga
- Memantau pelaksanaan SAKIP secara berkala agar akuntabilitas kinerja tetap terjaga
- Pertemuan berkala untuk memantau capaian target kerja PPNPN
- Survei lingkungan lembaga untuk memastikan kelaikan fasilitas yang digunakan melayani kebutuhan pelanggan
- Pemantauan survei praktik reformasi birokrasi
- Pemantauan kepuasan pelanggan di ULT yang dilihat dari unsur yang datang, keperluan, dan unit kerja yang dituju
- Pemantauan pengunjung web dilakukan secara berkala untuk memantau kebermanfaatan web bagi masyarakat

E. Manajemen Media

BPMP DKI Jakarta telah melakukan optimalisasi pemanfaatan media informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dan pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan terus mengupayakan:

- Web lembaga aktif, informatif dan terintegrasi dengan informasi dari Kemdikbudristek, Disdik dan mitra pendidikan lainnya.
- Pemanfaatan medsos Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube yang proporsional.
- Membuat terbitan berkala yang aktif: Jurnal Pendidikan dan Buletin.
- Aktif mensosialisasikan program/kegiatan WBK/WBBM melalui web, brosur , banner dan kegiatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Komite integritas/tim kerja dan manajemen BPMP DKI Jakarta telah optimal dalam menata ulang proses reformasi birokrasi di lingkungan BPMP DKI Jakarta dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa.

Pada tahap berikutnya, komite integritas dan manajemen BPMP DKI Jakarta akan terus melakukan evaluasi secara mandiri penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BPMP DKI Jakarta secara berkesinambungan dan terus mengupayakan inovasi layanan terhadap stakeholder sehingga keberadaan BPMP DKI Jakarta dirasakan manfaatnya oleh stakeholder dan masyarakat.




2. SARAN

Hal-hal menjadi fokus internal untuk dilaksanakan di tahun 2022 dan seterusnya adalah:

1. Mempublikasikan pembangunan ZI-WBK/WBBM di BPMP DKI Jakarta kepada seluruh stakeholder dan masyarakat.
2. Pemantauan capaian kinerja pegawai menggunakan instrumen yang dikembangkan.
3. Menyediakan fasilitas untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus.
4. Mengaktifkan peran pengawasan dalam pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan.
5. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berkinerja tinggi.

Hal-hal menjadi fokus eksternal untuk dilaksanakan di tahun 2022 dan seterusnya adalah:

1. Mengembangkan inovasi layanan BPMP DKI Jakarta berbasis IT melalui web.
2. Memantau tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan.
3. Melakukan evaluasi dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Menyediakan kompensasi bagi pelanggan bila mengalami ketidakpuasan atas layanan BPMP DKI Jakarta sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Mengintegrasikan web Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan web BPMP DKI Jakarta.

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Sri Rakhmawanti, SE, MM	Koordinator Manajemen Perubahan		19 Desember 2022
Diperiksa oleh	Rina Harjanti, S.Si, M.Pd	Ketua Tim ZI		20 Desember 2022
Disetujui oleh	Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd	Kepala BPMP		21 Desember 2022